

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hakikat dari otonomi daerah yakni setiap daerah memiliki hak untuk memiliki wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri seluruh urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah disepakati dengan memberikan berbagai bentuk pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing dan sesuai perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu otonomi daerah akan memberikan independensi pada pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah untuk menunjang kinerja dari seluruh sektor dengan berbagai proses yang harus dilalui meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban sesuai dengan inti yang tertera pada undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat beberapa prinsip yang terbentuk dalam sebuah regulasi yang dikelola secara tertib dengan dikelola secara tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta taat pada regulasi dan undang undang yang berpedoman pada peraturan yang telah disepakati demi terciptanya kinerja keuangan yang efektif dengan maksud memperoleh pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, ekonomis dengan maksud untuk memperoleh

masuk dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga tertentu, transparan dengan maksud menjaga keterbukaan agar masyarakat dapat mengetahui serta mendapatkan informasi yang memadai tentang keuangan daerah, serta bertanggung jawab dengan maksud untuk mewujudkan pertanggungjawaban pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dapat dipercaya dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaan serta keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan obyektif yang diatur dalam azas umum pengelolaan keuangan daerah sesuai Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah yang dikelola secara tertib.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, Selain melimpahkan kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah juga harus melakukan efektivitas dan efisiensi terhadap pengelolaan serta sumber pendapatan daerah tersebut demi terciptanya optimalisasi segala kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pemerintah harus terus melakukan improvisasi dalam mengelola kinerja keuangan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang didasari tujuan untuk memaksimalkan kinerja keuangan secara kreatif dan inovatif serta meminimalisir pemanfaatan bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat dengan

berbagai cara salah satunya yakni memaksimalkan sumber pendapatan asli daerahnya. Menurut Abdul Halim (2011 : 253) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah dapat melaksanakan otonomi yakni (1) kemampuan keuangan daerah, dengan arti harus memiliki kewenangan untuk dapat menggali sumber keuangan yang ada di daerah, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai kegiatan pemerintahan, dan ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat harus seminimal mungkin agar pendapatan asli daerah menjadi sumber keuangan, yang menjadi faktor penghambat keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah adalah: (1) Transfer dari pemerintah pusat yang dominan, karena pemerintah daerah kurang memaksimalkan perusahaan daerah sebagai sumber PAD, (2) Tingginya derajat sentralisasi pada sektor perpajakan, rendahnya penerimaan pajak dan lemahnya dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah .

Kinerja keuangan merupakan pencapaian atas tingkat hasil kerja pada bidang keuangan pemerintah daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan berbagai indikator keuangan yang telah ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran, analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di periode yang sudah berlalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga memperoleh posisi keuangan yang memiliki kegunaan untuk memberi informasi tentang kondisi keuangan secara nyata

serta untuk mengukur dan memprediksi potensi-potensi kinerja keuangan pada masa yang akan datang.

Pengukuran kinerja untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja sebagai pembanding skema pelaksanaan kerja serta peningkatan dan pengembangan kinerja pemerintah daerah, pengukuran kinerja keuangan dapat menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan perhitungan anggaran pendapatan serta belanja daerah yang terdiri dari rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah. Menurut (Mahmudi,2006) kinerja keuangan dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan daerah otonom dalam menyelenggarakan otonomi daerah dengan melihat kinerja keuangan dan akuntabilitas dari para pemangku kuasa dapat terlihat, setiap rupiah uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang telah memberikan uang untuk membiayai pembangunan serta memberikan manfaat kepada masyarakat.

Provinsi Jawa Timur memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan menduduki peringkat ke 10 provinsi yang memiliki PDB (Produk Domestik Bruto) tertinggi. Pada tahun 2019 Provinsi Jawa Timur memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,52 persen, provinsi Jawa Timur yang didukung oleh pertumbuhan pada kategori penyediaan akomodasi pangan sebesar 7,58 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 7,55 persen serta informasi dan komunikasi sebesar 7,36 persen, provinsi Jawa Timur memberikan sumbangan relatif besar dalam perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta dalam Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) Jatim 2019 turut menyumbang 14,92 persen dalam kontribusi terhadap PDB Nasional. Sektor industri terutama pada industri lemak/ minyak nabati dan kayu memberikan kontribusi dominan dan berkontribusi sebesar 84,80 persen dengan nilai mencapai 2,06 Miliar US Dollar yang terus mendorong percepatan peningkatan transaksi perdagangan luar negeri serta menambah devisa melalui ekspor guna menyeimbangkan neraca perdagangan Jawa Timur.

Untuk menilai kinerja keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah, dapat melakukan perhitungan dengan menggunakan rasio analisis keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil analisis rasio keuangan selanjutnya dipergunakan sebagai sarana untuk menilai kinerja keuangan (Abdul Halim:2007) : (1), penggunaan analisis rasio keuangan pada organisasi sektor publik, khususnya pemerintah daerah belum banyak dilakukan karena keterbatasan penyajian laporan keuangan yang tingkat cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh organisasi bersifat privat, (2) serta penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang ditekankan kepada pencapaian target sehingga perubahan yang terjadi kurang diperhatikan.

Dalam penelitian kali ini, peneliti melakukan perhitungan terhadap analisis kinerja keuangan pemerintah provinsi Jawa Timur dengan menggunakan tiga rasio perhitungan kinerja keuangan yakni rasio efisiensi rasio efektivitas. Secara konsep Rasio Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya pengeluaran untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi

pendapatan yang diterima, capaian target anggaran yang telah ditetapkan menggambarkan tingkat kinerja pihak pengelola serta mempengaruhi kinerja keuangan entitas yang bersangkutan, tidak hanya mengetahui tingkat efisiensi tetapi mengetahui tingkat efisiensi realisasi anggaran juga perlu dilakukan dari gambaran koefisienan pencapaian target dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Rasio Efektivitas menggambarkan keefektivan pencapaian target dengan cara membandingkan antara target anggaran dan realisasi selama satu periode akuntansi serta mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio Efektivitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan yang ditargetkan secara tepat. Analisis pertumbuhan pendapatan merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui kecendrungan baik berupa kenaikan atau penurunan kinerja pendapatan selama kurun waktu tertentu dan tentunya analisis pertumbuhan ini penting untuk mengetahui sejarah perkembangan kinerja keuangan daerah dari sisi pendapatan daerah maupun pengeluaran daerah. Pencapaian target anggaran yang telah ditetapkan menggambarkan tingkat kinerja pihak pengelola keuangan daerah serta mempengaruhi kinerja keuangan entitas yang bersangkutan. Alasan peneliti menggunakan rasio efisiensi, efektivitas dan Pertumbuhan adalah untuk mengetahui pendapatan yang diterima oleh daerah provinsi apakah sudah merealisasikan secara efisien, efektif dan tepat guna

serta memantau prospek pertumbuhan kinerja keuangan yang menentukan kinerja keuangan dalam jangka waktu yang panjang.

Hasil Penelitian (Anton Trianto, 2013) meneliti efektifitas dan efisiensi kota Palembang menunjukkan bahwa rata-rata nilai rasio keuangan mencapai tingkat efektif dengan memperoleh nilai 93,2 persen . Hasil penelitian (Sari, 2014) menganalisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah pada pemerintah daerah menunjukkan Pemkot Surakarta sangat efisien mengelola PAD yang dilihat dari hasil perhitungan menggunakan rasio efisiensi yakni sebesar 27,95 persen serta efektifitas Pemkot Surakarta dalam mengelola PAD mengalami peningkatan dari efektif menjadi sangat efektif yang sebelumnya sebesar 94,81 persen (2010) menjadi sebesar 102,79 persen (2011).

Hasil Penelitian (Anim Rahmyati, 2016) meneliti kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Sukoharjo menunjukkan kinerja keuangan pada Pemkab Sukoharjo menunjukkan angka kriteria efektif dengan memperoleh nilai angka rata-rata diatas 100 persen serta Pemkab Sukoharjo sangat efisien dalam mengelola PAD karena perhitungan rasio efisiensi menunjukkan angka 2,80 persen. Hasil Penelitian (Judy Julian Pilat & Jenny Morasa) meneliti kinerja keuangan Pemerintah kota Manado, tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah kota Manado terbilang sangat efektif dan sangat efisien dengan rata-rata nilai rasio sebesar 99,864% selama 5 tahun periode anggaran.

Berdasarkan latar belakang penulisan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016-2020 Diukur Dengan Rasio Efisiensi, Efektivitas dan Pertumbuhan.”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2016-2020 apabila diukur dengan menggunakan rasio efisiensi, efektivitas dan pertumbuhan?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan dari penulisan karya ilmiah kali ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2016-2020 apabila diukur dengan menggunakan perhitungan rasio efisiensi, efektivitas dan pertumbuhan.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian kali ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya adalah :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian kali ini diharapkan dapat menambah pengetahuan atas informasi yang terkandung dalam analisis kinerja keuangan daerah khususnya Provinsi Jawa Timur serta memperluas wawasan pada bidang Akuntansi khususnya pada Akuntansi Sektor Publik atau biasa dikenal dengan Akuntansi Pemerintahan

b. Manfaat Praktis

Penelitian kali ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan dalam penelitian kali ini, berikut adalah adalah manfaat praktis dari penelitian bagi pihak-pihak yang terkait :

1. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Penelitian kali ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi serta sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dalam menganalisis Kinerja Keuangan guna meningkatkan kinerja keuangan berupa peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Bagi Masyarakat Provinsi Jawa Timur

Penelitian kali ini diharapkan dapat memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat khususnya masyarakat Provinsi Jawa Timur tentang kinerja keuangan serta pengukuran terhadap kinerja keuangan.